

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah bangsa jika ingin besar, pendidikan haruslah menjadi salah satu pondasinya. Para pendiri bangsa ini tampaknya sangat memahami hal tersebut, sebagaimana dapat kita lihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Di dalam pembukaan UUD tersirat semangat untuk mencerdaskan kehidupan seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali.

Pendidikan untuk semua, merupakan semangat yang ada dalam pengembangan pendidikan Indonesia. Hal ini tergambar dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif Bagi Peserta

Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Dalam pasal 1, dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sehingga bentuk pendidikan inklusif adalah yang digunakan bangsa Indonesia untuk mencerdaskan seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Selaras dengan pernyataan Salamanca pada Konferensi Dunia terkait Pendidikan Berkebutuhan Khusus 1994 menyatakan dasar pendidikan inklusif bahwa semua anak seharusnya dapat belajar bersama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang ada (UNESCO, 1994). Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua anak sesuai dengan kelompok usianya (Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). Menurut Sugiarto, bahwa pendidikan inklusif adalah sebuah proses pendidikan yang didasarkan pada prinsip bahwa sekolah harus menyediakan layanan bagi semua anak, terlepas dari perbedaan yang dipersepsikan, atau perbedaan sosial, emosional, budaya, atau bahasa lainnya (Sugiarto & Nuphanudin, 2020).

Sebagaimana data **Badan Pusat Statistik** pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia mencapai angka 1,6 juta anak. Dimana dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, baru 18 persen yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Atau sekitar 115 ribu anak berkebutuhan khusus yang dapat bersekolah di SLB, sedangkan ABK yang bersekolah di sekolah

reguler pelaksana Sekolah Inklusif sekitar 299 ribu (Maulipaksi, 2017). Pendidikan inklusif tentunya dapat menjadi sebuah peluang dan tantangan dalam perbaikan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari komposisi jumlah sekolah reguler dan sekolah luar biasa, salah satu contohnya Provinsi DKI Jakarta. Jika dilihat dari data jumlah sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan SLB negeri yang ada di DKI, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar Sekolah Negeri Di DKI Jakarta

No	Wilayah	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1	Kab. Kepulauan Seribu	15	8	1	1	0
2	Kota Jakarta Pusat	182	37	14	14	1
3	Kota Jakarta Utara	151	43	19	8	3
4	Kota Jakarta Barat	363	59	23	11	3
5	Kota Jakarta Selatan	315	75	34	18	5
6	Kota Jakarta Timur	446	113	48	21	1
	Total	1472	335	139	73	13

Sumber : <https://referensi.data.kemdikbud.go.id>, per Oktober 2020.

Dari tabel diatas terlihat jumlah sekolah luar biasa (SLB) masih sangat sedikit, maka sehingga pendidikan inklusif di sekolah negeri bisa menjadi peluang untuk menciptakan pendidikan yang luas bagi anak dengan kebutuhan khusus. Akan tetapi ada juga masalah atau tantangan yang harus di jawab pemerintah yaitu ketersediaan sarana prasarana dan guru pendamping khusus (GPK) di sekolah-sekolah negeri. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Tahun 2019 bahwa jumlah guru pendamping khusus sangat sedikit hanya sebanyak 29 orang sehingga sangat tidak sesuai dengan perbandingan sekolah jika seluruh sekolah menerima anak berkebutuhan khusus (Afifa et al., 2020). Selain itu dari sisi sarana dan prasaran belum semua sekolah negeri memiliki fasilitas ramah anak untuk anak berkebutuhan khusus.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang sangat mendukung dan berkomitmen untuk berperan serta dalam pelaksanaan sebuah sistem pendidikan yang inklusif. Hal ini tercermin dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Aturan tersebut diperkuat dan diperjelas dengan lahirnya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 623 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Nama-Nama TK, SD, SMP dan SMA/SMK Penyelenggara Pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta, yang menunjuk sekolah-sekolah untuk berkomitmen untuk menyediakan layanan pendidikan inklusif bagi siswa-siswa dengan disabilitas. Hal ini karena pemerintah provinsi DKI Jakarta sangat menyadari keterbatasan sekolah luar biasa yang ada di DKI Jakarta.

Seperti yang kita sadari bahwa proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler bukanlah perkara mudah. Karena mereka harus mampu bersosialisasi dengan baik dan kurikulum yang tidak berbeda dengan siswa normal. Proses pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus menjadi semakin sulit dengan adanya kejadian luar biasa pandemi corona atau COVID 19 dimana semua proses pembelajaran melalui online. Hal ini merubah seluruh mekanisme berkehidupan dan bermasyarakat di dunia secara cepat dan tak terduga termasuk di Indonesia. Presiden Joko Widodo kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Lahirnya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) Nomor 12 tahun 2020, kemudian melahirkan banyak kebijakan pembatasan-pembatasan di berbagai lini kehidupan di Indonesia. Termasuk di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang

kemudian melahirkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pertama kali diberlakukan tanggal 10 April 2020 sampai dengan 23 April 2020. Pembatasan tersebut memiliki dampak sangat besar dalam berbagai faktor kehidupan masyarakat, salah satunya di dunia pendidikan. Sehingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kemudian mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) tentang pembelajaran jarak jauh.

Hal ini lalu direspon oleh Dinas Pendidikan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 33/SE/2020 tentang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)/ Home Learning Bermakna dan Menyenangkan. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian dalam implementasi program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang ada di lingkungan sekolah DKI Jakarta. Sehingga seluruh proses pembelajaran di DKI Jakarta dilakukan dari rumah melalui virtual. Pembelajaran secara virtual di sekolah diwajibkan bagi semua anak termasuk dengan anak berkebutuhan khusus (ABK). Situasi saat ini merupakan tantangan tersendiri bagi sekolah maupun anak berkebutuhan khusus dalam melakukan proses pembelajaran.

Hal ini senada dengan yang disampaikan pakar pendidikan ABK Unesa, Prof. Dr. Budiyanto bahwa pembelajaran online untuk anak berkebutuhan khusus tidak mudah, ada tiga faktor yang harus disiapkan dalam proses penerapan pembelajaran daring yakni dimensi komunikasi, dimensi teknis dan dimensi pembelajaran (Sofiana, 2020). Dimana harus ada interaksi dan kolaborasi antara guru dan orang tua siswa. Sehingga harus tetap ada panduan sederhana kepada orang tua, agar pendampingannya maksimal atau yang

disebut juga teknik intruksional. Sehingga anak berkebutuhan khusus tidak semakin tertekan dalam proses pembelajaran.

Dengan strategi pengelolaan pembelajaran yang baik, anak berkebutuhan khusus diharapkan juga mendapatkan pendidikan yang baik. Manajemen pembelajaran yang tepat diharapkan dapat menjadi solusi bagi kesenjangan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal agar mendapatkan pendidikan yang setara. Banyak pemaknaan tentang manajemen, sebagian mengartikan hanya sebatas administrasi semata. Tetapi menurut penulis, konsep manajemen jauh lebih luas dari hanya semata-mata administrasi. Terry (Terry & Rue, 2014) memaknai manajemen sebagai sebuah proses khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.

Keempat tindakan-tindakan tersebut dikenal sebagai empat dasar fungsi manajemen yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengawasan), yang kemudian disingkat menjadi POAC. Hal ini sejalan dengan pendapat Djafri, bahwa manajemen merupakan suatu alat pokok, karena tidak hanya ditujukan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menetapkan tujuan-tujuan dan sasaran yang harus dicapai, tetapi juga untuk mengkombinasikan secara efektif bakat orang-orang dan mendayagunakan sumber-sumber materil (Djafri, 2017). Dimana titik awal dari proses manajemen adalah menetapkan sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan dari organisasi, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapainya dan mengkomunikasikannya kepada orang-orang yang bertugas untuk mencapainya serta menentukan bagaimana mengukur sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan tersebut.

Sedangkan pembelajaran berasal dari kata dasar yaitu belajar. Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaktif peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan menurut Winataputra yang dikutip oleh Ngalimun, bahwa pembelajaran mengandung arti proses yang membuat orang melakukan proses belajar sesuai dengan rancangan (Ngalimun, 2018). Dan hasil dari sebuah pembelajaran adalah perubahan individu.

Berangkat dari makna manajemen dan pembelajaran, konsep manajemen pembelajaran dapat diartikan proses mengelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian (pengarahan) dan pengevaluasian kegiatan yang berkaitan dengan proses membelajarkan si pembelajar dengan mengikutsertakan berbagai faktor di dalamnya guna mencapai sebuah tujuan (Sagala, 2009). Manajemen pembelajaran merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah manajemen sekolah. Karena dengan pengelolaan manajemen pembelajaran yang baik dapat dipastikan akan terciptanya sebuah manajemen sekolah yang optimal juga, hal ini sejalan dengan ide manajemen berbasis sekolah.

Manajemen pembelajaran anak berkebutuhan khusus memiliki peran penting dalam proses kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya di DKI Jakarta yang sangat konsisten dalam mendorong pendidikan inklusif. Evaluasi dan monitoring sistem pembelajaran inklusi harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa telah dilakukan perbaikan-perbaikan dalam kebijakan sistem pendidikan inklusif, seperti penelitian yang dilakukan oleh Terzi (Terzi, 2014), yang menghasilkan kesimpulan bahwa untuk menghasilkan persamaan dalam sistem pendidikan kita harus mulai membongkar ulang pemaknaan dan

pelaksanaan pendidikan inklusif untuk menghilangkan ketimpangan yang masih mewarnai. Dengan cara mengevaluasi kebijakan pendidikan di sekolah, kurikulum dan strategi pembelajaran. Ataupun penelitian yang dilakukan oleh Watkins and Ebersold (Watkins & Ebersold, 2016), yang mengatakan bahwa kebijakan inklusi harus fokus pada kesetaraan peluang dan efektifitas sekolah dalam hal aksestabilitas, partisipasi dalam proses pembelajaran, kompetisi dan keterlibatan sosial.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hodge, dkk (Hodge et al., 2017), yang mengungkap faktanya banyak guru yang tidak mau mengajar anak berkebutuhan khusus, tetapi hasil temuan bahwa semakin professional persiapan seorang guru akan membuat semakin suksesnya sebuah proses pembelajaran inklusif dan meningkatkan kepercayaan

diri anak berkebutuhan khusus. Ataupun penelitian yang dilakukan Germain, dkk (Germain-Rutherford & Kerr, 2008), yang meneliti tentang model desain intruksional online yang inklusif secara budaya, karena mempelajari konsep budaya dan budaya belajar sebuah masyarakat akan sangat membantu keberhasilan proses pembelajaran secara online.

Persamaan kesempatan mendapatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus merupakan amanat dari hak dasar manusia. Dan dapat melihat proses pendidikan inklusif pada masa pandemi COVID 19 sebagai sebuah keadaan luar biasa, peneliti melakukan penelitian tentang manajemen pembelajaran inklusif di daerah Jakarta Timur karena memiliki jumlah SMP terbanyak di DKI Jakarta dengan tempat Sekolah Menengah Pertama Negeri 36. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 623 Tahun 2012 sebagai sekolah yang wajib menyediakan layanan pendidikan inklusif di Jakarta Timur dan sampai saat ini masih menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Selain itu dari beberapa sekolah yang sudah melewati *grant tour question*, SMPN 36 merupakan sekolah yang memiliki administrasi baik terkait dengan anak berkebutuhan khusus contohnya data awal dari psikolog (*assessment*) yang menyatakan bahwa seorang anak mampu berinteraksi dengan kondisi persekolahan normal. Dan dari hasil wawancara sementara di dapatkan bahwa klasifikasi anak berkebutuhan khusus di SMPN 36 sangat variatif yaitu tunanetra, tunawicara, dan lamban belajar sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang kompleks terhadap proses pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus. Dari wawancara awal dengan Guru BK selaku koordinator anak berkebutuhan khusus didapatkan dalam proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus, SMPN 36 telah melakukan proses manajemen inklusif. Dimana pihak sekolah telah melakukan proses identifikasi awal kemampuan anak berkebutuhan khusus, perencanaan dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan anak berkebutuhan khusus dan evaluasi proses pembelajaran yang berlangsung.

Dan di masa pandemi COVID 19, apakah manajemen inklusif juga berjalan dengan baik termasuk dalam proses pembelajaran secara online?. Selain itu pertanyaan mendasar bagaimanakah pelaksanaan manajemen pembelajaran yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membantu siswa berkebutuhan khusus dalam sistem pendidikan sekolah inklusif ?. Dan ditengah pandemi COVID 19 yang tiba-tiba ini dan sebuah kejadian luar biasa, penelitian ini juga akan mengkaji langkah-langkah seperti apa yang dilakukan oleh sekolah maupun guru-guru untuk menjawab hambatan yang ada dalam proses pembelajaran secara online yang dihadapi oleh siswa berkebutuhan khusus?. Karena sekolah inklusif merupakan sistem pendidikan yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam

memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi siswa berkebutuhan khusus agar dapat memperoleh pendidikan yang setara dan bermutu. Sebagaimana tujuan pendidikan inklusif yaitu meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan untuk menuju masyarakat yang demokratis, karena memang berbeda dengan konsep pendidikan luar biasa.

Hal ini merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran realitas di lapangan dan pembelajaran untuk berbagai pihak bukan hanya tentang proses manajemen pembelajaran inklusif di sekolah tetapi sekaligus juga manajemen pembelajaran siswa berkebutuhan khusus secara online karena adanya COVID 19. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang: **Manajemen Pembelajaran Inklusif di SMPN 36 Jakarta (Studi Kasus Pada Masa Pandemi COVID 19).**

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka fokus penelitian ini adalah “Manajemen pembelajaran siswa berkebutuhan khusus pada masa pandemi covid 19 di SMPN 36 DKI Jakarta”. Dari fokus penelitian tersebut, kemudian dijabarkan kedalam sub fokus penelitian yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran siswa berkebutuhan khusus.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka ada beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran online siswa berkebutuhan khusus di SMPN 36 DKI Jakarta pada masa pandemi COVID 19?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran online siswa berkebutuhan khusus di SMPN 36 DKI Jakarta pada masa pandemi COVID 19?
3. Bagaimana evaluasi pembelajaran online siswa berkebutuhan khusus di SMPN 36 DKI Jakarta pada masa pandemi COVID 19?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini menghasilkan dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah khasanah keilmuan berkenaan dengan manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah menengah pertama.
 - b. Sebagai tambahan referensi manajemen pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara inklusif.
 - c. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti-peneliti lain guna mengadakan penelitian mengenai pembelajaran siswa berkebutuhan khusus pada SMP penyelenggara inklusi atau pada lembaga lain.
2. Secara praktis
 - a. Memberikan masukan alternatif memilih materi, strategi, media, serta evaluasi yang tepat pada proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus.
 - b. Memberikan gambaran secara lebih komprehensif kepada sekolah ataupun dinas terkait tentang keadaan dilapangan. Sehingga dapat dijadikan masukan

dalam proses pengambilan kebijakan selanjutnya terkait dengan proses pembelajaran secara online untuk anak berkebutuhan khusus agar lebih efektif dan efisien.

E. Kebaruan Penelitian (*state of the art*)

Dimensi kebaruan juga menjadi perhatian dalam penelitian ini, karena diharapkan penelitian ini dapat memberikan dampak positif dalam masyarakat, kebaruan tersebut akan digambarkan melalui matriks persamaan dan perbedaan dibandingkan penelitian sebelumnya.

Tabel 1.2

Matriks Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sejenis

No	Judul Penelitian dan Tahun Jurnal	Jenis Penelitian	Hasil	Perbedaan	Persamaan	
1	<i>Assistive Technology for Inclusive Education: Evidence from Indonesia</i> Sugiarto Universitas Negeri Jakarta, Nuphanudin Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia, and Akademi Militer, Magelang, Indonesia International	Menggunakan metodologi wawancara dengan sample Percik Insani Therapist Education Center, yaitu komunitas orang tua siswa dari anak-anak berkebutuhan khusus (anak berkebutuhan khusus)	Percik Insani Education Center, adalah komunitas tua dari siswa berkebutuhan khusus yang membangun sebuah pembelajaran online atau teknologi web secara gratis. Web ini di bangun sebagai pusat pelatihan para guru untuk meningkatkan kemampuan profesional terhadap kebutuhan individual anak	Insani Education Center, adalah komunitas tua dari siswa berkebutuhan khusus yang membangun sebuah pembelajaran online atau web secara gratis. Web ini di bangun sebagai pusat pelatihan para guru untuk meningkatkan kemampuan profesional terhadap kebutuhan individual anak	Penelitian ini lebih memfokuskan pengembangan kemampuan mengajar dan bahan pembelajaran para guru inklusi dengan penggunaan teknologi, pada komunitas pendidikan tertentu. Sehingga penelitian ini berbeda dalam hal teori dan sample yang	Penelitian ini membahas pendidikan anak berkebutuhan khusus berbasis web atau penggunaan alat bantu pada proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus sebenarnya bisa melakukan pembelajaran melalui online tetapi harus

	Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 08, (2020), pp. 1309-1315 ISSN: 2005- 4238 IJAST		berkebutuhan khusus dan juga tempat bahan pembelajaran. Sehingga diharapkan kompetensi guru inklusi yang dipadukan dengan bahan ajar berbasis web yang efektif akan membuat guru mendidik setiap anak berkebutuhan khusus secara lebih efektif.	akan diambil.	disesuaikan dengan kebutuhan individual masing-masing anak.
2	Implementasi Program Pendidikan inklusi di Provinsi DKI Jakarta (Studi di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi) Raafinda Nur Afifa, Ari Subow ejournal3.undi p.ac.id Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020 DOI: 10.14710/ /jppmr.v9i2.27 366	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi, Dimana sekolah ini merupakan salah satu contoh model sekolah inklusi sejak tahun 2005 berdasarkan SK Nomor 205/2005 dan hingga saat ini masih menyelenga rakan pendidikan inklusi	Berdasarkan hasil penelitian, maka Implementasi Program Pendidikan inklusi di Provinsi DKI Jakarta dengan studi pada SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi sudah dilaksanakan dengan baik. Walaupun ada beberapa saran perbaikan seperti harus ada asesment dari psikologi untuk seluruh siswa berkebutuhan khusus, Dinas Pendidikan DKI Jakarta seharusnya mengalokasikan dana sesuai SDLB dan pengadaan guru pendamping yang mencukupi.	Penelitian menggunakan teori yang berbeda, yaitu teori implementasi kebijakan pendidikan inklusi sehingga tidak membahas tentang proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus hanya sebatas pada program pendidikan inklusi di DKI Jakarta.	Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah negeri di DKI Jakarta.

- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
| <p>3 Studi Evaluatif Implementasi Pembelajaran Daring Selama Pandemi COVID-19
Marinus Waruwu Prodi Administrasi Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana</p> <p>Jurnal Administrasi Pendidikan 27 (2) (2020) 288-295
https://ejournal.upi.edu/
https://doi.org/10.17509/jap.v27i2 ISSN: p.1412-8152 e.2580-1007</p> | <p>Penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan metode survei. Partisipan penelitian adalah 40 orang guru pada sekolah dasar swasta katolik yang diambil secara acak (random) proporsional yang tersebar di berbagai kota di Jawa Barat. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama 3 bulan sejak Maret-Juni 2020</p> | <p>Berdasarkan hasil penelitian, beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, hasil analisis data menunjukkan bahwa pembelajaran daring di Sekolah Dasar selama pandemik COVID-19 mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi, otonomi, kreativitas, kemandirian peserta didik dan menunjukkan kesiapan institusi sekolah baik guru maupun fasilitas untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kedua, hasil analisis data menunjukkan bahwa pembelajaran daring kurang maksimal pada peningkatan kemampuan peserta didik, khususnya yang bersifat non akademis seperti pembentuk karakter, efektivitas interaksi dalam pembelajaran, pembelajaran tuntas, peningkatan kepribadian, <u>memberian motivasi</u></p> | <p>Penelitian menggunakan metode yang berbeda. Dimana fokus penelitian adalah studi evaluatif implementasi pembelajaran daring. Selain itu objek penelitian bukan anak berkebutuhan khusus.</p> | <p>Penelitian membahas penggunaan daring pada proses pembelajaran selama masa pandemic COVID 19.</p> |
|--|---|--|---|--|

yang berorientasi pada keteladanan hidup dan akurasi evaluasi terhadap peningkatan kemampuan peserta didik

4	<p>Gambaran Pelaksanaan Pendidikan inklusif Sekolah Dasar Negeri Di Jakarta Barat Heny Mularsih Jurusan Psikologi, Universitas Tarumanagara Jakarta</p>	<p>Penelitian kualitatif dengan metode survey. Partisipan penelitian ini adalah guru atau kepala sekolah dari 50 sekolah. Pengambilan sampel dengan purposive sampling, dengan kriteria sekolah dasar negeri yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif selama minimal 3 tahun. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner tertutup dan terbuka (untuk memperoleh data yang alami/apanya).</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Inklusi di lingkungan Jakarta Barat belum memenuhi syarat standar penyelenggaraan inklusi di antaranya terdapat komponen peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, sarana prasarana. Penerimaan siswa secara online tidak dapat mengklasifikasi siswa normal atau berkebutuhan khusus karena hanya berdasarkan usia 7 tahun. Siswa ABK yang sekolah di negeri tidak didiagnosis oleh psikolog meskipun kriteria siswa ABK seharusnya ditentukan oleh psikolog. Masalah kesulitan pengadaan guru pendamping khusus menjadi faktor <u>penting yang belum</u></p>	<p>Perbedaan metode yang digunakan, serta objek penelitian. Penelitian ini berbicara tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri di Jakarta Barat. Tidak membahas tentang penyelenggaraan pembelajaran anak berkebutuhan khusus.</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang pendidikan inklusif di DKI Jakarta. Aspek-aspek apa saja yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif.</p>
---	---	--	--	---	--

terealisasi.

5	Managemen Pembelajaran Siswa berkebutuhan khusus di SMPN 36 DKI Jakarta (Studi Kasus Pada Masa Pandemi COVID 19) Tyas Ratnawati	Penelitian kualitatif, deskriptif, dengan metode wawancara mendalam. Dengan informan yaitu siswa, orang tua, guru serta kepala sekolah.	Perbedaan teori dengan penelitian-penelitian terdahulu. Peneliti membahas proses pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus dikaitkan dengan penggunaan metode pembelajaran jarak jauh (online) sebagai dampak pandemi COVID 19.	Peneliti membahas tentang pendidikan inklusipada sekolah negeri di DKI Jakarta. Selain itu juga peneliti membahas tentang dampak dari pandemi COVID 19 pada proses pembelajaran siswa yang harus menggunakan pembelajaran jarak jauh
---	---	---	--	--

Sumber : Intrepetasi Peneliti (2020)

Penelitian ini akan meneliti manajemen pembelajaran dengan penggunaan metode pembelajaran daring pada siswa berkebutuhan khusus di SMPN 36 Jakarta pada masa pandemi COVID 19. Penggunaan metode belajar daring pada siswa berkebutuhan khusus di sekolah negeri belum pernah dilakukan selama ini sehingga merupakan sebuah hal baru dan menantang baik untuk guru, siswa maupun orang tua sebagai pendamping. Tentunya manajemen pembelajaran yang baik sangat dibutuhkan diawali dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Dan hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut karena jika dapat berjalan dengan baik tentunya dapat menjadi alternatif pembelajaran.